

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

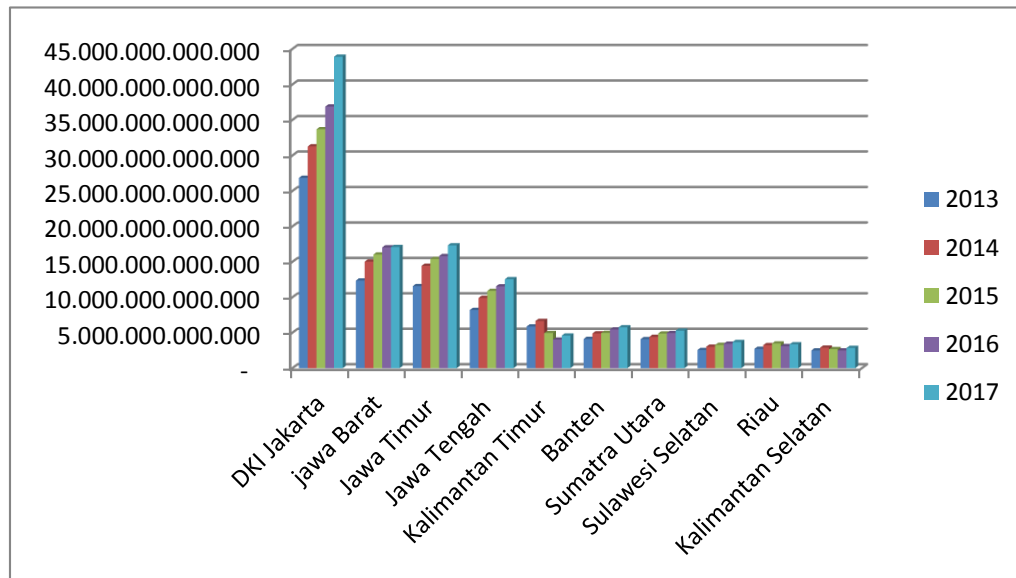
Negara Indonesia pernah terjadi krisis ekonomi yang pada tahun 1998 memberikan dampak yang cukup besar bagi pemerintah. Hal ini, berdampak dengan adanya perubahan pada otonomi pemerintahannya dari pemerintah sentralisasi berubah menjadi desentralisasi sejak Januari 2001, yang artinya segala wewenang pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah. Dengan adanya mekanisme desentralisasi akan memberikan perkembangan perekonomian yang sangat luas, besar, bertanggung jawab maka pemerintah pusat akan memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya (Darise, 2009). Hal ini sejalan dengan terwujudnya Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Sepuan, 2008).

Desentralisasi Fiscal yang ada di dalam Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 terdiri dari tiga macam, yaitu Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus. Ketika pemerintah sudah menjadi sistem desentralisasi maka pemerintah daerah diharapkan mampu mandiri dalam mengelola keuangan daerah serta diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Berkaitan dengan konsep PAD menurut studi bank Dunia (Rondinelli, 1989) dalam (Jaya dan Winanta, 2014) menyatakan pemerintah dapat melaksanakan fungsinya secara efektif apabila diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan pengeluaran sektor publik yang harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik dari PAD,

bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman maupun subsidi dan bantuan Pemerintah Pusat.

Menurut (Ikbar, 2017) semakin besar PAD, semakin mandiri daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan, besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah. Dalam menjalankan perekonomian yang ada di setiap daerah tentunya tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat untuk menjalankan perekonomian daerahnya, tentu pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi-potensi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah agar dapat terwujud dengan baik. Menurut (Aryanti, 2009) pemerintah perlu mengidentifikasi dan menganalisis sektor potensial yang dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan di daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Wulandari dan Ayuningsari (2014) Salah satu cara untuk mengukur kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan memperhatikan besarnya jumlah PAD yang dapat diperoleh oleh suatu daerah. Menurut (Ikbar, 2017) Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator dari kemandirian otonomi daerah dalam menggali potensi untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Hal ini berarti semakin tinggi nilai PAD dari suatu daerah maka semakin tinggi juga tingkat kemandirian suatu daerah. Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan PAD beberapa Provinsi di Indonesia 2013-2017.



Gambar 1.1 : Perkembangan PAD 10 Provinsi yang memiliki nilai PAD tertinggi (Milyaran Rupiah)

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019 (Data Diolah)

Dari hasil gambar diatas yang sudah diolah, dapat disimpulkan bahwa Provinsi DKI Jakarta secara rata-rata memiliki nilai PAD yang tertinggi dari tahun 2013-2017. Hal tersebut, disebabkan DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia yang merupakan titik perputaran ekonomi tercepat, segala kegiatan perekonomian yang ada di DKI Jakarta menjadi tolak ukur pembangunan perekonomian. Sedangkan, Provinsi Jawa Timur menempati peringkat ke tiga dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerahnya. Tentunya, hal tersebut menjadikan hal yang patut diapresiasi terhadap pemerintah daerah yang mampu mendorong pencapaian PAD-nya. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang salah satu provinsi yang menjadi nilai PAD nya cukup tinggi, nilai tersebut diperoleh dari sisi Hasil Pajak Daerahnya yang cukup tinggi.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Jawa Timur 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Sumbangan
2013	Rp 11.579.340.719.022	66,5
2014	Rp 14.442.216.534.959	69,5
2015	Rp 15.402.647.674.503	69,3
2016	Rp 15.817.795.024.797	63,4
2017	Rp 17.339.288.199.162	58

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019 (Data Diolah)

Fenomena yang terjadi saat ini lebih terjadi di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan 5 tahun terakhir pada tahun 2013-2017 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam sindonews.com berdasarkan berita yang dipublikasikan yang dibuat oleh (Hakim, 2018) yang berisi pengungkapan Soekarwo Gubernur Jawa Timur bahwa selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang ada. Berdasarkan data diatas peneliti melakukan penelitian di Provinsi Jawa Timur karena dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 nilai PAD Jawa Timur termasuk yang paling tinggi di Indonesia dengan 38 kabupaten/kota. Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Timur dinilai mampu dalam mengelola daerahnya sebab besar presentase yang disumbang dari nilai PAD cukup besar, melebihi dari 50% yang ada, sisanya dibantu melalui Dana Perimbangan maupun Dana Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Lain.

Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur degan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam satu periode tertentu. Data PDRB juga dapat

menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimiliki dan faktor produksi masing – masing daerah (Sukirno, 2006).

Secara fungsional meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya (Batik, 2013).

Dalam pengelolaannya pembangunan daerahnya pemerintah juga perlu memiliki modal yang lebih dalam melakukan pembangunan tersebut. Hal ini dapat menjadikan peluang para investor untuk melakukan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun asing. Saat pemerintah daerah memperoleh tambah modal dari investor, nantinya akan digunakan untuk membiayai infrastruktur pembangunan yang ada di daerah tersebut. Tentu hal ini akan berdampak baik bagi Pendapatan Asli Daerah.

Dengan adanya APBD, Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan dana dengan baik dari APBD yang nanti bermanfaat dalam menambahkan aset tetap daerah melalui belanja modal. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Purwanto, 2013). Menurut (Mardiasmo, 2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan pemerintah daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak didukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat. Mungkin menurut (Berutu, 2017) Semakin tinggi tingkat investasi

modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan pendapatan.

Beberapa peneliti terdahulu, yang dilakukan oleh Atmaja (2011), Lestari (2016), dan (Jaya dan Widanta, 2014) penelitian tentang pengaruh PDRB dan Pendapatan Asli Daerah mengungkapkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa PDRB secara stimulan dan parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikbar (2014) yang penelitian tersebut menjelaskan bahwa PDRB memiliki hubungan yang berpengaruh tetapi negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asmuruf, dkk (2015) menjelaskan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Wulandari dan Ayuningsari (2014), Lestari (2016), Ikbar (2017), Ifrizal (2014), Aggraini (2017) yang meneliti variabel Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel Investasi secara parsial ataupun stimulan memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Berutu (2017) mengenai Belanja Modal dan PAD menjelaskan bahwa secara stimulan belanja modal memiliki pengaruh yang positif, akan tetapi secara parsial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darwanis (2014) menjelaskan bahwa memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, penelitian yang

dilakukan oleh Nugroho (2012) menjelaskan bahwa Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Peneliti memilih tempat di Provinsi Jawa Timur, dikarenakan APBD Jawa Timur dalam 5 tahun mengalami kenaikan Rp 10 Triliun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Pendapatan Asli Daerah mampu menyumbang dana 66,5 % ke Pendapatan Daerah pada tahun 2013, tahun 2014 senilai 69,5%, tahun 2015 senilai 69,3%, tahun 2016 senilai 63,4 % dan pada tahun 2017 58 %. Hal ini tentunya diharapkan pemerintah daerah mampu dalam mengelola perekonomian daerahnya dengan baik.

Selain itu berdasarkan peneliti terdahulu yang sudah dilakukan oleh Lestari (2016) peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali dengan menggunakan variabel PDRB dengan penghitungan total dari PDRB bukan penghitungan perkapita, menambahkan investasi dalam negeri menjadi satu variabel total, yang sebelumnya hanya menambahkan variabel investasi asing saja, itu menjadi keunikan dari penelitian ini. Sedangkan, peneliti tidak menggunakan variabel inflasi seperti yang sudah digunakan oleh peneliti sebelumnya, disebabkan karena data yang dihitung melalui BEI, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Data yang dihitung adalah se-Indonesia bukan, kabupaten/kota yang diharapkan. Sehingga, peneliti menggubah dengan variabel belanja modal. Variabel belanja modal ini, memberikan fungsi dimana untuk menambah aset daerah melalui tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigas, jaringan, dll. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Peneliti dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian terkait judul “**Analisis Pengaruh PDRB, Investasi, Belanja Modal**

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Pengaruh Belanja terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, tersebut guna :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk meningkatkan wawasan dari peneliti serta menambah referensi bagi penelitian selanjutnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi dalam pengembangan teori kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya sejalan dengan teori yang harus di implementasikan.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah atau Lembaga Terkait

Hasil dari penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan masukan melalui *research*. Agar, Pemerintah daerah maupun Lembaga yang terkait selalu mengupayakan peningkatan wawasan yang berkenaan dengan Pendapatan Asli Daerah yang akan berdampak dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

1.4.2.2 Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terlebih khususnya kepada Investor selaku penanam modal yang sangat membantu Pemerintah Daerah untuk membiayai segala keperluan yang belum tercukupi melalui Pajak dan Retribusi. Investor diharapkan dapat membantu daerah-daerah yang memerlukan tambahan modal, dimana daerah yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah.